

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
				- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.000.000.000	APBD
				- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	153.193.000	APBD
				- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.675.000.000	APBD
				- Pembentukandan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	550.000.000	APBD
				- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	854.100.000	DAU
				- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30.714.000	DAU
				- Penyediaan sandang	277	DAU
				- Penyediaan Alat Bantu	24.942.760	
				- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.951.760	DAU
				- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.000.000	DAU

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Penyediaan Makanan - Pelayanan Dukungan Psikososial - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 	163.133.855 58.000.430 25.000.000 34.615.690 12.519.907	DAU DAU DAU DAU DAU
			-			
			- Jumlah anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam RKPD dan APBD		6.076.055.294	APBD / DAU
			- Langkah konkrit dalam percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, berupa pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.133.855	DAU
			- Koordinasi penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota			
			- Capaian/penurunan/pengentasan angka kemiskinan (Data BPS)			
			- Capaian penghapusan kemiskinan ekstrim (Data BPS/BPTaskin)			
			- Langkah konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode pelaporan			
			- Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lingkup kabupaten/kota			
			Memutakhirkan data penerima dengan NIK, nama dan alamat (by NIK, by name by address)			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			- Langkah konkrit dan data persentase penerima yang telah dimutakhirkan dengan NIK, nama dan alamat (by NIK, by name by address)			
			Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			
			<ul style="list-style-type: none"> - Langkah konkrit dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem - Data, informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 			
			Menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan			
			- Bukti dokumentasi penyampaian laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala.			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			perundang-undangan			
		Sekolah Rakyat	Penyiapan Sekolah Rakyat			
			- Data, informasi, dan dokumentasi dukungan penyediaan lahan (pinjam pakai/hibah) untuk Sekolah Rakyat			
			Penyiapan perizinan Sekolah Rakyat	- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	295.742.740	APBD
			- Dokumentasi dukungan proses perizinan yang dilakukan			
			Penyiapan guru dan tenaga pendidik			
			- Jumlah guru dan tenaga pendidik memenuhi standar kebutuhan (rasio murid-guru memadai) - Persentase guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai (minimal pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik atau pelatihan setara)			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
		Pembangunan Tiga Juta Rumah	Fasilitasi Penerbitan Perkada tentang Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab/Kota			
			- Data, informasi, dan dokumentasi fasilitasi penerbitan Perkada tentang Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kab/Kota. (UU 23/2014) - Data, informasi, dan dokumentasi fasilitasi penerbitan Perkada tentang Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab/Kota			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Kab/Kota			
			<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran untuk pembangunan/peremajaan/pemugaran/pemeliharaan dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah - Langkah konkrit percepatan proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Kab/Kota - Data, informasi, dan dokumentasi proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap di Kab/Kota 			
			Mensosialisasikan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG Kab/Kota			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kab/Kota 			
			Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan BPHTB dan PBG Kab/Kota			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi, dan dokumentasi laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kab/Kota 			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			<ul style="list-style-type: none"> - Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pembangunan 3 Juta Rumah 			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
	Ketahanan Pangan	Pengadaan dan pengolahan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemmerintah	Memberikan penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah			
			<ul style="list-style-type: none"> - Surat penugasan resmi dari kepala daerah kepada OPD terkait (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dll). - Data, informasi dan dokumentasi kegiatan penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah 			
			Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada wilayah masing-masing dalam mendukung pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah			
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi Forkopimda yang membahas topik pengadaan/ penyaluran CBP. - Persentase data, informasi dan laporan jumlah stock Gabah/Beras Dalam Negeri 			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			<ul style="list-style-type: none"> - Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 	- Updating data LP2B (2026)		APBD
	Kesehatan untuk semua	Jaminan Kesehatan Nasional	Menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program JKN			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi dan dokumentasi terkait penyusunan dan penetapan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program JKN 			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN			
			<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN - Persentase data realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN 			
			Memastikan kecukupan kepesertaan JKN dari seluruh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) yang meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU) baik pegawai Pemerintah maupun pegawai swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)			
			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Universal Health Coverage (UHC) Kab/Kota - Data, informasi dan dokumentasi kepesertaan JKN berdasarkan segmen dari BPJS kesehatan setempat 			
			Memastikan setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program JKN			
			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase data Penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif program JKN - Langkah konkrit untuk memastikan setiap penduduk di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta aktif program JKN 			
			Memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah			
			<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan spesifik untuk kontribusi peserta penerima JKN sesuai kapasitas fiskal daerah - Jumlah anggaran untuk kontribusi peserta penerima JKN sesuai kapasitas fiskal daerah - Data dan informasi pembayaran iuran dilakukan tepat waktu dan tidak menimbulkan tunggakan 			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		Makan Bergizi Gratis (MBG)	Kepala Daerah mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan			
			<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan spesifik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis - Alokasi dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan - Persentase realisasi dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Perkarangan Pangan Bergizi (P2B) 	500.000.000 500.000.000	APBD APBD
			Penyediaan tanah untuk dipinjamkaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Gizi Nasional			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi dan dokumentasi tanah untuk pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Gizi Nasional - Data dan informasi mengenai status kepemilikan tanah jelas, tidak dalam sengketa, dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) 			
			Kepala daerah menyiapkan surat persetujuan pinjam pakai BMD berupa tanah berdasarkan permohonan pinjam pakai dari kepala BGN			
			<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan pinjam pakai dari kepala BGN kepada Kepala Daerah - Surat persetujuan terkait pinjam pakai yang diterbitkan oleh Kepala 			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			Daerah sesuai ketentuan tentang pengelolaan BMD - Berita acara dan dokumentasi penyerahan atau perjanjian objek pinjam pakai yang ditandatangani kedua belah pihak (Kepala Daerah dan BGN)			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
	Perluasan akses pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan			
			- Program/kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan dalam RKPD, APBD dan APBD-P - Alokasi anggaran dalam APBD untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. - Persentase hasil kegiatan percepatan pembangunan dan revitaliasi Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Pengendalian inflasi	Gubernur/Bupati/Walikota mendukung tugas TPID			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan untuk mendukung tugas TPID dalam Dokumen Perencanaan Daerah. - Alokasi anggaran untuk mendukung tugas TPID dalam APBD dan APBD-P - Data capaian/penurunan/pengentasan angka inflasi selama periode pelaporan - Data, informasi, dan dokumentasi kegiatan koordinasi dengan Tim pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat 			
			9 (Sembilan) langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi 9 langkah konkrit 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Gerakan Tanam Padi Serentak 	155.000.000	APBD
			Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah			
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi, dan dokumentasi penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah 			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			<ul style="list-style-type: none"> - Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 			
		Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan SDM KDMP dan Sistem Pelaporan keuangan KDMP sebanyak 8*182 (24 Angkatan) /Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah 	1.900.000.000	APBD/ APBN

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
				Kab/Kota		
			- Data, informasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan koordinasi dengan Menteri Koperasi terkait pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
			Mendorong dan memfasilitasi OPD bidang Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	- Beli Mobil Operasional KDMP Toyota Haice/Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Kab/Kota	700.000.000	APBD/ APBN
			<ul style="list-style-type: none"> - Data, informasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan koordinasi dengan Menteri Koperasi terkait pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Penetapan SK Kepala Daerah tentang pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi - Sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada pemerintah kabupaten/kota - Langkah konkrit dalam mendorong dan memfasilitasi OPD bidang Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 	- Pembinaan dan Pendampingan kelembagaan KDMP sebanyak 182 KDMP / Pelaksanaan Pemeriksaan, dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Kab/Kota.	500.000.000	APBD
			Mendorong dan memfasilitasi OPD bidang PMD untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
			<ul style="list-style-type: none"> - Langkah konkrit dalam mendorong dan memfasilitasi OPD bidang PMD untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdeskus) dalam 			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
			Menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Dokumen Perencanaan Daerah			
			- Data, informasi dan dokumentasi program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Dokumen Perencanaan Daerah			
			Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi			
			- Anggaran yang diperlukan dalam fasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah Provinsi			
			Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan Mendagri, Menteri Koperasi, serta Menteri Desa dan PDT			
			- Penyampaian laporan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi/kreativitas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
		Kemudahan perizinan di daerah	Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha			
			- Data, informasi dan dokumentasi langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha			
			Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	UPAYA YANG DILAKUKAN	PEKERJAAN/SUB KEGIATAN OPD	ESTIMASI PENDANAAN	SUMBER DANA
			- Data, informasi dan dokumentasi penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha	- Revisi Perda RTRW (2026)	1.400.000.000	APBD
			Upaya lain yang dilakukan (sesuai peraturan perundang-undangan)			
			- Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat kemudahan perizinan di daerah	Penyusunan Perbup dan Materi Teknis RDTR: - Kawasan Mandeh (2026) - Kaw. KTM Silaut (2026) - Kaw. Perkotaan Tapan - Kaw. Perkotaan Ibukota Kecamatan = 15	800.000.000 18 Dok 144.000.000.000 800.000.000 800.000.000	APBD
	Proyek strategis nasional lainnya	Kegiatan yang ditetapkan oleh presiden	-			

KEPALA



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001